RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

AKD: RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

Bulan: Juli 2021

Oleh: RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG, PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN DAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembentukan dan penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi. Dalam rapat plenonya, Baleg sepakat terhadap ketiga RUU untuk dapat masuk ke tahap berikutnya.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses peradilan di seluruh Indonesia. "Sehingga terwujudnya peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan di seluruh wilayah NKRI," ujarnya saat Rapat Pleno Baleg terkait Pengambilan Keputusan terhadap hasil Penyusunan ketiga RUU di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin, (14/6/2021).

Adapun ketiga RUU itu ialah; RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan Pengadilan Tinggi Papua Barat. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Serta, RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Beberapa pertimbangan pendirian pengadilan tinggi di daerah-daerah tersebut berdasarkan kebutuhan peradilan bagi masyarakat.

Meski demikian, menurut Supratman, pihaknya mengakui bahwa belum semua provinsi memiliki ketiga bentuk pengadilan tinggi secara lengkap, seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN yang belum dimiliki seluruh Ibu Kota Provinsi. Penyebabnya beragam mulai dari keterbatasan dukungan anggaran hingga ketersediaan tenaga pendukung pengadilan di daerah tersebut.

"Mungkin bisa jadi masukan bagi Anggota Baleg. Khusus untuk PTTUN di setiap provinsi bisa ada. Maka akan ada lagi pengajuan RUU baru. Supaya semua (provinsi) sama. Ke depan diharapkan ada usulan lagi," ungkapnya. (ah/es)

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	DPR Setujui 13 RUU Inisiatif Baleg Jadi Usul DPR RI	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33834/t/DPR+Setujui+13+RUU+Inisiatif+Baleg+Jadi+Usul+DPR+RI
Berita	Baleg DPR Sepakati Tiga RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi di Beberapa Daerah	https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33410/t/Baleg+DPR+Sepakati+Tiga+RUU+Pembentukan+Pengadilan+Tinggi+di+Beberapa+Daerah
Berita	Baleg DPR setujui penyusunan RUU pembentukan PT, PTTUN, dan PT Agama	https://www.antaranews.com/berita/2210114/baleg-dpr-setujui-penyusunan-ruu-pembentukan-pt-pttun-dan-pt-agama
Berita	Baleg sepakat bentuk Panja RUU PT TUN dan Pengadilan Tinggi Agama	https://www.antaranews.com/berita/2071742/baleg-sepakat-bentuk-panja-ruu-pt-tun-dan-pengadilan-tinggi-agama
Berita	PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGKAT BANDING BARU TERUS BERJALAN	https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3072/pembentukan-pengadilan-tingkat-banding-baru-terus-berjalan
Berita	Sejarah Pengadilan - PTUN Banjarmasin	https://ptun-banjarmasin.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan
Berita	Sejarah Pengadilan - PTUN Manado	https://ptun-manado.go.id/tentang/sejarah-pengadilan/
Berita	Sejarah Pengadilan - PTUN Palembang	https://ptun-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
Berita	SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI HADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN BALEG DPR RI	https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4586/sekretaris-mahkamah-agung-ri-hadiri-rapat-dengar-pendapat-dengan-baleg-dpr-ri
Berita	Visi dan Misi - PTUN Banjarmasin	https://ptun-banjarmasin.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi
Berita	Visi dan Misi - PTUN Manado	https://ptun-manado.go.id/tentang/visi-dan-misi-pengadilan-tata-usaha-negara-manado/
Berita	Visi dan Misi - PTUN Palembang	https://ptun-palembang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan
Buku	Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=3936&keywords=pengadilan+tinggi+tata+usaha+negara
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986	https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/689.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA	https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_51.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA	https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/9.pdf